

RANCANG BANGUN PENDIDIKAN BELA NEGARA SEBAGAI WAHANA PENGEMBANGAN SIKAP NASIONALISME BAGI MAHASISWA

Yunita, Karim Suryadi

Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: yunitayunita2@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep serta implementasi Pendidikan Bela Negara sebagai wahana pengembangan sikap nasionalisme mahasiswa. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Peneliti memilih metode studi kasus untuk menganalisis secara mendalam berkaitan dengan Pendidikan Bela Negara (PBN) yang dilaksanakan di Universitas Siliwangi sebagai wahana untuk meningkatkan sikap nasionalisme mahasiswa. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksana PBN UNSIL yaitu Wakil Rektor III UNSIL, Pemateri PBN, Pelatih PBN, dan Peserta PBN UNSIL 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Model PBN UNSIL 2016 berbeda dengan model pelatihan bela negara Lemhannas dan bukan merupakan adaptasi dari kegiatan Lemhannas. PBN UNSIL lebih bersifat semi militer. 2) Permasalahan pokok dalam penanaman sikap nasionalisme mahasiswa yaitu penanaman sikap nasionalisme hanya bersifat tentatif dan tidak berkelanjutan. 3) Menyikapi permasalahan pokok dalam penanaman nasionalisme mahasiswa maka diperlukan kegiatan yang berkesinambungan yang menjadi rutinitas kampus, baik dalam kegiatan akademik, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat diantaranya: a) pengimplementasian nilai-nilai Pancasila, b) pengoptimalan Pendidikan Kewarganegaraan.

Kata Kunci: Pendidikan Bela Negara, Nasionalisme, Mahasiswa

PENDAHULUAN

Penelitian tentang Pendidikan Bela Negara (PBN) sebagai wahana pengembangan nasionalisme mahasiswa Universitas Siliwangi penting dan menarik untuk di kaji mengingat beberapa alasan:

Pertama, terus menjamurnya perilaku yang menunjukkan lemahnya nasionalisme di berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Generasi muda merupakan modal sosial (*social capital*) negara yang diharapkan dapat memainkan peran strategis agar dapat mendukung terciptanya kehidupan bangsa dan negara yang tentram dengan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai dasar semangat dalam mewujudkan keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara. Namun, kondisi yang dewasa ini begitu memprihatinkan, tidak sedikit pemuda yang mengabaikan hak dan

kewajiban bela negara. Hal tersebut diperkuat dengan berbagai tindakan *disorder* yang ditampilkan pemuda seperti fenomena tawuran antar pemuda yang kian marak terjadi, tindakan penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak diri, serta kecenderungan hidup individualisme sebagai akibat buruk globalisasi dan modernisasi yang tidak disikapi secara cerdas.

Hal ini juga dikuatkan oleh hasil survei *Developing Countries Studies Center (DCSC)* Indonesia tentang semangat nasionalisme dalam rangka Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober serta Hari Pahlawan 10 November 2011. Hasil survei DCSC menyebutkan 83,3 persen responden mengaku sangat bangga dan bangga sebagai orang Indonesia. Sementara, hanya 5,5 persen yang mengatakan tidak bangga, sisanya, 11,2 persen menjawab tidak tahu (www.wartakota.co.id). Namun, jika dibandingkan dengan survei yang sama pada tahun 2010 yang dirilis oleh Lingkar Survei Indonesia (LSI) justru semangat nasionalisme yang dimiliki bangsa Indonesia menandakan penurunan. Hasil survei LSI tahun 2010 menyebutkan 92,1 persen responden menjawab sangat atau cukup bangga sebagai bangsa Indonesia, sementara yang kurang atau tidak bangga sama sekali sebanyak 4,2 persen dan 3,7 persen tidak tahu (nasional.kompas.com). Oleh karena itu harus dilakukan upaya untuk mengantisipasi dampak negatif dari globalisasi.

Kedua, Pendidikan Bela Negara masih memerlukan konsep yang konkret dan sesuai dengan heterogenitas peserta. Persoalan bela negara masih menyisakan pekerjaan bagi terciptanya kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia. Aksi-aksi terorisme dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk pembenaran aksi mereka, kini sering terjadi. Munculnya gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang dilakukan oleh pemuda dari berbagai negara menjadi hal yang harus di waspadai. Gerakan ini bisa saja menarik anak muda Indonesia dengan propaganda-propaganda mereka untuk melakukan jihad, dengan janji kebahagiaan dunia dan akhirat. Jenderal TNI Muldoko menegaskan bahwa Indonesia potensial untuk terpenetrasi gerakan ISIS, karena lapisan anak muda potensial mudah terpengaruh oleh propaganda cara cepat hidup bahagia, dengan menggulingkan regim, dan kalau gagal dalam perjuangan, ditunggu oleh syurga. Beliau menyerukan agar bersama-sama dengan masyarakat, TNI dan Kepolisian RI harus mewaspadai gerakan ini agar bisa melakukan penangkalan sedini mungkin. (liputan6.com).

Ketiga, Universitas Siliwangi sebagai Center of Excellence Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat menjadi contoh pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengkajian Strategik, Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Pengukuran Ketahanan Nasional. Salah satu bentuk kerjasama dalam Lemhannas RI dengan Pendidikan Tinggi adalah ditandatanganinya nota kesepakatan Lemhannas RI dengan Universitas Siliwangi di Ruang Nusantara II Gd. Trigatra Lemhannas RI pada Senin 22 Desember 2014.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memandang penelitian terhadap program Pendidikan Bela Negara (PBN) sebagai wahana meningkatkan Nasionalisme Mahasiswa sebagai hal yang menarik untuk diteliti.

Maka, penelitian ini berfokus pada Pendidikan Bela Negara (PBN) sebagai wahana Pengembangan Sikap Nasionalisme Mahasiswa Universitas Siliwangi.

PEMBAHASAN

Pendidikan Bela Negara (PBN) merupakan program tahunan Universitas Siliwangi (UNSIL) yang bertujuan untuk meningkatkan rasa Nasionalisme dan kedisiplinan mahasiswa di Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya.

Dalam kegiatan PBN, mahasiswa mendapatkan berbagai materi dan praktek tentang Peraturan Baris Berbaris (PBB), Peraturan Upacara Militer (PPM) dan Bongkar Pasang Senjata oleh Pelatih Anggota Brigif 13/1 Kostrad dan Kodim 0612/Tasikmalaya. Fasilitator dalam kegiatan ini terdiri dari Kapolres Tasikmalaya, TNI, DANLANUD, Dandim dan pihak UNSIL. Tujuan kegiatan ini adalah pembinaan dalam segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, pengarahan, dan pengendalian untuk mengubah sikap dan perilaku mahasiswa sebagai warga negara yang tanggap terhadap permasalahan bangsa dan negara yang dilandasi pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara.

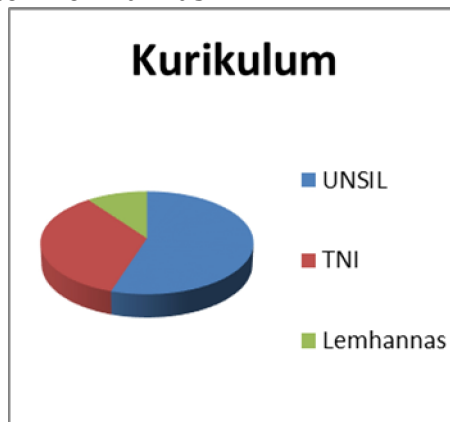
Model Pendidikan Bela Negara (PBN) UNSIL 2016

Model adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses seperti penilaian kebutuhan, pemilihan media dan evaluasi (Briggs dalam Elhefni, 2011 hlm.305). Secara umum model PBN UNSIL 2016 berbeda dengan model pelatihan bela negara Lemhannas, dan bukan merupakan adaptasi dari kegiatan Lemhannas. PBN UNSIL merupakan kerjasama dari beberapa pihak, yaitu UNSIL, POLRI, DANLANUD, BRIGIF, KODIM 0612 dan Lemhannas.

Secara lebih spesifik, model PBN unsil dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Kurikulum

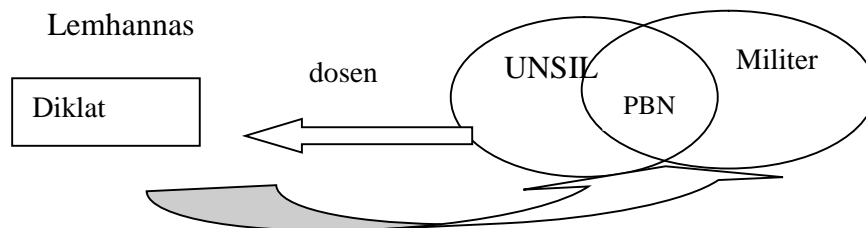
Kurikulum PBN UNSIL di buat oleh UNSIL bekerjasama dengan TNI dan mengadaptasi materi dari materi Lemhannas.



2) Kemitraan

PBN UNSIL merupakan gambaran kegiatan/program yang melibatkan berbagai komponen, diantaranya Lemhannas sebagai bentuk dukungan pemerintah, bentuk dukungan Lemhannas berupa Diklat untuk Dosen yang diselenggarakan di Pusdiklat Lemhannas, yang kemudian alumni diklat ini menjadi pemateri dan penggerak

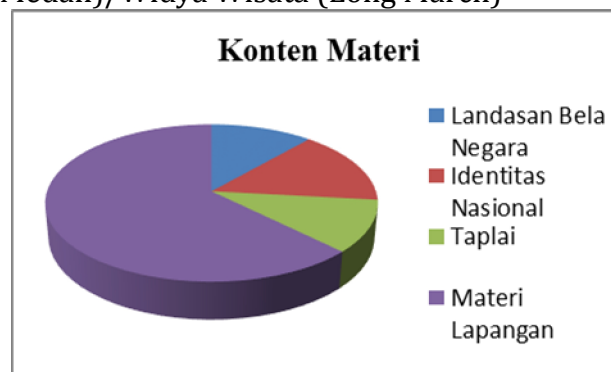
Pendidikan Bela Negara UNSIL. Kemitraan juga terjalin dengan militer, yaitu KODIM, POLRES, dan DANLANUD sebagai pihak yang berperan sebagai Pelatih terutama dalam materi lapangan, dan UNSIL sendiri sebagai pihak akademisi, komponen-komponen tersebut merupakan pihak-pihak yang memegang peranan penting dalam pengembangan Bela Negara di Indonesia serta berperan penting dalam pengembangan semangat nasionalisme mahasiswa.



3) Konten Materi

Secara garis besar, konten materi PBN UNSIL terdiri dari materi kelas dan materi lapangan, dengan rincian sebagai berikut:

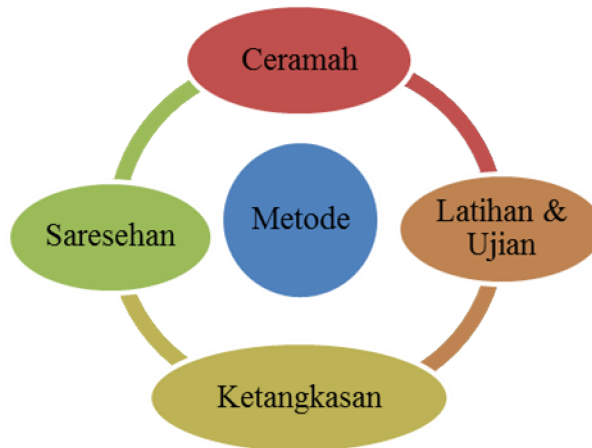
- Landasan Dan Konsep Bela Negara:
- Identitas Dan Ketahanan Nasional:
- Materi Lapangan Dalam Bentuk /Peragaan:
 - PBB-AB
 - Tata Upacara Bendera dan Penghormatan dalam TUM/TUS
 - Kebugaran Jasmani
 - Outbound (Ilmu Medan)/Widya Wisata (Long March)



Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konten materi PBN UNSIL secara umum bertujuan untuk pembentukan karakter, terutama kesadaran berbangsa dan bernegara, kedisiplinan, kekeluargaan dan gotong royong, serta kemandirian.

4) Metode

PBN UNSIL menggunakan 4 metode, yaitu Metode Ceramah dan tanya Jawab; Seminar/Saresehan; Metoda Ketangkasan; Metoda Latihan dan Ujian. Setiap pemateri dan pelatih memvariasikan metode tersebut, dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.



5) Evaluasi

Dalam evaluasi, bobot kehadiran dalam setiap sesi memiliki bobot paling besar, yaitu Kehadiran peserta 70%, selanjutnya Kompetensi 20% (bobot 20) dan Kepribadian 10 % (bobot 10).

Gambaran di atas memaparkan rancang bangun model pendidikan bela negara yang dilaksanakan di Universitas Siliwangi. Dari gambaran di atas dapat dipami bahwa model pendidikan bela negara di universitas siliwangi merupakan model pelatihan semi militer yang dipadukan dengan pengembangan nilai-nilai kebangsaan.

Model pendidikan bela negara tersebut merupakan salah satu model pendidikan bela negara yang diterapkan di jenjang pendidikan tinggi. Dengan kegiatan pendidikan bela negara ini, diharapkan dapat meningkatkan sikap nasionalisme mahasiswa Indonesia. Menurut Minogue (dalam Adisusilo, tanpa tahun) nasionalisme Indonesia pada masa kini telah melewati tiga tahap, yaitu: (1) tahap *stirrings*, pada tahap ini bangsa menjadi sadar akan dirinya sebagai bangsa yang mengalami penderitaan berupa tekanan-tekanan, yaitu era perubahan cepat melawan gagasan asing dan cara hidup asing dalam mengerjakan segala sesuatu; (2) tahap *centre-piece nasionalisme*, yaitu masa perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan; (3) tahap konsolidasi, yang pada masa sekarang tahap ini difokuskan pada konsolidasi ekonomi.

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa tantangan pengembangan nasionalisme masa kini berbeda dengan masa sebelumnya. Persoalan krusial yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah semakin tergerusnya jiwa dan semangat nasionalisme yang kemudian berimplikasi pada rapuhnya sendi-sendi berbagai segi kehidupan baik sosial, budaya, ekonomi politik dan pertahanan keamanan (Rochwulaningsih, tanpa tahun). Tergerusnya jiwa dan semangat nasionalisme tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh globalisasi. Jika kewaspadaan masyarakat Indonesia rendah, terhadap globalisasi dan regionalisasi maka akan sangat mudah mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa (Ginting, 2013).

Sebagai implementasi teori nasionalisme dalam konteks Indonesia dari Renann, Karl Kautsky, dan Karl Radek, Otto Bouer, dan Soekarno adalah nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara (*state guard*) menurut Dirjen Pothan Kemhan (2010,

hlm. 29-34) yang diterbitkan dalam bentuk Naskah Bahan Ajar Pembinaan Bela Negara, terdiri dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela Negara (Bahar, 2010:2-3). Nilai-nilai bela negara itu, harus dimiliki dan dilakukan semua warga negara Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari (Tippe, 2013. Hlm. 422-423).

Untuk memupuk sikap nasionalisme, pendidikan bela negara saja tidak cukup, akan tetapi diperlukan cara lain sebagai tambahan. Beberapa cara tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Dengan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila.

Adiwarma dalam jurnal nya mengemukakan bahwa Implementasi Nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang penting dalam meningkatkan Ketahanan Nasional. Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni: *Pertama*; Penegakkan kekuasaan Hukum. *Kedua*; Mengaktifkan kehidupan dengan prinsip Gotong Royong. *Ketiga*; Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat *Keempat*; Sistem Politik Berorientasi Rakyat berdasarkan gotong royong. (Adirwana, tanpa tahun, hlm.50-52).

Aditya eko (2012), mengemukakan bahwa cara untuk pengimplementasian nilai-nilai pancasila adalah melalui penggalian nilai-nilai yang terdapat di dalamnya yang kemudian di belajarkan dalam nilai yang lebih konkret. Salah satunya adalah nilai cinta tanah air. Dengan demikian, dalam kegiatan bela negara maupun dalam kegiatan keseharian kampus pengimplementasian nilai-nilai pancasila ini penting untuk di tambahkan.

2) Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Apabila di analisis, konten materi PBN Universitas Siliwangi adalah konten dari materi Pendidikan Kewarganegaraan. Seperti yang dipahami bahwa Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut (Depdiknas, 2006:49) :

- a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan Jaminan keadilan
- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional
- c. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, Penghormatan dan perlindungan HAM
- d. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan

- pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara
- b. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi
 - a. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi
 - b. Pancasila meliputi: Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka
 - c. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, upaya berkesinambungan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sikap nasionalisme adalah dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat diarahkan untuk membentuk warga negara muda yang mampu berpartisipasi efektif dalam kehidupan berbangsa. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggungjawab tersebut tentunya memerlukan penguasaan konsep ilmu pengetahuan mengenai ikhwal kewarganegaraan, sehingga warga negara dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara sadar serta diiringi oleh kecerdasan kepribadian dalam melakukan berbagai tindakan partisipasi tersebut. Oleh karena itu Somantri, N., (dalam Wahab A.A dan Sapriya, 2011. hlm. 312) menjelaskan bahwa:

Tujuan PKN yang hendaknya dirinci dalam tujuan kurikuler yang meliputi: (1) *ilmu pengetahuan*, yang mencakup fakta, konsep dan generalisasi, (2) *keterampilan intelektual*, dari keterampilan sederhana sampai keterampilan kompleks, dari penyelidikan sampai kesimpulan yang sah, dari berpikir kritis sampai berpikir kreatif, (3) *sikap*, meliputi nilai, kepekaan, dan perasaan, dan (4) *keterampilan sosial*.

Hal senada juga diungkapkan oleh Budimansyah, D (2010, hlm. 145) menyatakan bahwa PKN mencakup tiga kompetensi kewarganegaraan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*), dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). Ketiga kompetensi yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa diceraikan. Dalam artian ketika satu dari ketiga kompetensi tersebut terabaikan, atau tidak tercapai dengan baik, maka kecerdasan yang dimiliki warga negara akan pincang dan tidak akan berbuah hasil yang baik.

Bela negara pada dasarnya tindakan diri yang dilakukan sebagai wujud nasionalisme yang membutuhkan kesadaran yang tinggi bagi setiap warga negara

untuk melakukannya. Artinya, tanpa rasa kesadaran yang tinggi sebagai bangsa dan negara Indonesia, bela negara tidak akan dapat dilaksanakan. Terlebih ketika masyarakat hanya memandang upaya bela negara hanya sebagai kewajiban pemerintah dan aparatnya yang dilatih secara militer. Jika hal tersebut terjadi, maka sesungguhnya negara berada pada posisi yang sangat mengawatirkan, ketahanan nasional akan melemah, keutuhan negara terancam, kedaulatan negara pun akan lembek.

Dalam perspektif teori fungsionalisme struktural, sebuah negara bangsa yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan nilai bersama yang dapat dijadikan nilai pengikat integrasi (*integrative value*), titik temu (*common denominator*), jati diri bangsa (*national identity*) dan sekaligus nilai yang dianggap baik untuk diwujudkan (*ideal value*). Nilai bersama ini tidak hanya diterima tetapi juga dihayati. Dalam pandangan teori kewarganegaraan communitarian, sebuah komunitas politik bertanggung jawab memelihara nilai-nilai bersama (*common values*) tersebut dalam rangka mengarahkan individu (Winarno, 2010). Melalui PKn nilai-nilai bersama yang merupakan komitmen sebuah komunitas diinternalisasikan sehingga tumbuh penghayatan terhadapnya. (Niborhu, 2015, hlm.85).

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa model pendidikan bela negara di universitas siliwangi merupakan model pendidikan bela negara semi militer yang dipadukan dengan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Konten dari PBN UNSIL sebagian besar adalah konten materi PKn, dan sebagian lainnya adalah konten materi militer.

KESIMPULAN

Memperhatikan pada temuan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Model PBN UNSIL 2016 berbeda dengan model pelatihan bela negara Lemhannas dan bukan merupakan adaptasi dari kegiatan Lemhannas. PBN UNSIL lebih bersifat semi militer.
2. Permasalahan pokok dalam penanaman sikap nasionalisme mahasiswa yaitu penanaman sikap nasionalisme hanya bersifat tentatif dan tidak berkelanjutan.
3. Menyikapi permasalahan pokok dalam penanaman nasionalisme mahasiswa maka diperlukan kegiatan yang berkesinambungan yang menjadi rutinitas kampus, baik dalam kegiatan akademik, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat diantaranya: a) pengimplementasian nilai-nilai Pancasila, b) pengoptimalan Pendidikan Kewarganegaraan.

Rekomendasi

Merujuk pada kesimpulan di atas, maka diajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Menyusun program Pendidikan Bela Negara dengan perencanaan yang matang, yaitu dengan terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan dan penyusunan kurikulum yang matang.

2. Mengintegrasikan penanaman nilai-nilai nasionalisme ke dalam berbagai kegiatan baik dalam Pembelajaran, Penelitian maupun Pengabdian Kepada Masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, Eko.(2012). *Validasi Konkuren Skala Keber-Pancasila-an pada Remaja Mahasiswa di Jakarta*. INSAN Vol.14 No 01 April 2012
- Adiwarman. (-----). *Pancasila dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional*. Jurnal Vol.2 N0. 1
- Budimansyah, D. (2010). *Mari Berpartisipasi dalam Bela Negara*. Bandung: Garasindo
- Elhefni. (2011). *Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Dan Hasil Belajar di Sekolah*. TA'DIB, Vol. XVI, No. 02, Edisi Nopember 2011, halaman 305
- Ginting, Liasta. (2013). *Ancaman Globalisasi dan Regionalisasi Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa*. Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 1 Volume 3 Tahun 2013
- Naiborhu, Murni.dkk. (2015). *Pembudayaan Nilai-Nilai Luhur Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*.Jurnal Darma Agung.
- Tippe, Syarifudin. (2013). *Implementasi Kebijakan Bela Negara Di Perbatasan : Studi Kasus di Provinsi Papua*. Jurnal Sosioteknologi Edisi 29 Tahun 12, Agustus 2013
- Wahab, A.A dan Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta